



Evaluasi Manajemen Pascabencana Tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah

Arshafa Rayya Maulidya¹, Christine Cicilia Sinaga², Chelomitha Dini Aprillia Putri³, Syaroni⁴, Mohammad Fauzan Al Angsyari⁵, Cahyo Bagus Alfian⁶, M. Noer Falaq Al Amin⁷, Nuh Krama Hadianto⁸

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi 24040674179@mhs.unesa.ac.id, 24040674180@mhs.unesa.ac.id,
24040674185@mhs.unesa.ac.id, 24040674194@mhs.unesa.ac.id, 24040674195@mhs.unesa.ac.id,
24040674211@mhs.unesa.ac.id, noerfalaqalamin@unesa.ac.id, nuhhadianto@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

The tsunami disaster that struck Palu in 2018 caused multidimensional impacts on social, economic, and governance aspects. This study aims to evaluate post-disaster management in Palu City using the Build Back Better approach within the Sendai Framework 2015–2030. This research employed a qualitative approach with a literature review method through descriptive-analytical analysis of various scientific journals, official reports, and relevant policy documents. The results indicate that rehabilitation and reconstruction processes have been implemented across various sectors, including infrastructure recovery, social recovery, economic recovery, and governance improvement. However, their implementation still faces several challenges, such as suboptimal inter-agency coordination, limited institutional capacity, and the lack of integration of risk-based approaches into regional development planning. In addition, the recovery process for vulnerable groups, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as well as sustainable mitigation efforts, still requires more consistent attention. This study concludes that post-disaster management in Palu City needs to be strengthened through cross-sectoral coordination, institutional capacity building, risk mitigation integration, and community empowerment in order to achieve resilient and sustainable recovery.

Keywords: post-disaster management, Palu tsunami, Build Back Better, mitigation.

ABSTRAK

Bencana tsunami yang melanda Kota Palu pada tahun 2018 menimbulkan dampak multidimensional pada aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen pascabencana di Kota Palu menggunakan pendekatan Build Back Better dalam kerangka Sendai Framework 2015–2030. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis deskriptif-analitis terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan resmi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan pada berbagai sektor, meliputi pemulihan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum terintegrasinya pendekatan berbasis risiko dalam pembangunan daerah. Selain itu, proses pemulihan kelompok rentan, pelaku UMKM, serta penguatan mitigasi berkelanjutan

masih memerlukan perhatian yang lebih konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pascabencana di Kota Palu perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi mitigasi risiko, serta pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pemulihan yang tangguh dan berkelanjutan. **Kata Kunci:** Pascabencana, Tsunami Palu, Build Back Better, Mitigasi.

PENDAHULUAN

Bencana tsunami yang melanda Kota Palu pada tahun 2018 merupakan salah satu bencana dengan dampak multidimensi yang signifikan di Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan dampak yang luas, baik pada aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kejadian tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur secara masif, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar serta gangguan serius terhadap sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, fase pascabencana menjadi tahap krusial yang menentukan keberhasilan proses pemulihan dan pembangunan kembali. Manajemen pascabencana tidak hanya berfokus pada rehabilitasi fisik, tetapi juga mencakup pemulihan sosial, ekonomi, psikologis, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Dari perspektif manajemen bencana, evaluasi terhadap fase pascabencana menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik maupun operasional yang terjadi selama proses penanganan. Pendekatan ini menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan dalam pengelolaan bencana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang perlu diperbaiki, meliputi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, koordinasi lintas sektor, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat terdampak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesiapsiagaan klaster kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu masih berada pada kategori kurang siap dengan indeks nilai 53 (Saputri et al., 2025).

Dalam mengevaluasi kondisi pascabencana di Kota Palu, penelitian ini menggunakan *Build Back Better Framework* sebagaimana tercantum dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses pemulihan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengurangan kerentanan sosial-ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan. Selain itu, pendekatan *Build Back Better* juga menekankan aspek keberlanjutan, keadilan sosial, dan integrasi mitigasi risiko dalam proses rekonstruksi agar seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh manfaat secara merata.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kerentanan sosial masyarakat (Susetyo et al., 2025), koordinasi kelembagaan dalam penanganan bencana (Sulistiawan et al., 2022), serta kebijakan pemulihan pascabencana berbasis gender (Syari & Amrullah, 2025). Namun, kajian yang secara khusus mengevaluasi manajemen pascabencana tsunami di Kota Palu dengan menggunakan pendekatan *Build Back Better* secara komprehensif masih relatif terbatas. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen pascabencana tsunami di Kota Palu dengan menitikberatkan pada identifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model manajemen pascabencana yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk mengevaluasi manajemen pascabencana tsunami di Kota Palu. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis secara mendalam terhadap data sekunder yang berasal dari berbagai sumber kredibel, sehingga efektif dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam kerangka *Build Back Better* yang terdapat dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber secara sengaja berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Sumber data mencakup jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, serta studi kasus yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, ekonomi, infrastruktur, dan mitigasi bencana di Kota Palu. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria relevansi tema, tahun publikasi, kredibilitas sumber, serta keterkaitan dengan fokus penelitian. Proses pencarian literatur dilakukan melalui database *Google Scholar*, portal Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta berbagai jurnal nasional dan internasional, dengan kata kunci “manajemen pascabencana Palu”, “rekonstruksi tsunami Palu”, dan “*Build Back Better* Palu”. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui seleksi terhadap temuan yang relevan, kemudian data disajikan secara tematik berdasarkan aspek manajemen pascabencana, dan selanjutnya dilakukan triangulasi sumber untuk memastikan validitas data. Evaluasi penelitian difokuskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, dengan membandingkan implementasi kebijakan terhadap faktor penyebab bencana serta kondisi pemulihan pascabencana sejak tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pascabencana di Kota Palu memperlihatkan kompleksitas tantangan pada aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Evaluasi dilakukan melalui analisis terhadap kondisi wilayah terdampak, faktor penyebab bencana, proses pemulihan, serta efektivitas kebijakan pascabencana yang telah diimplementasikan.

Gambaran Umum Kondisi Pascabencana di Kota Palu

Kota Palu merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana *multi-hazard*, yang meliputi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Kerentanan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi geologis yang berada pada

zona aktif, tetapi juga oleh faktor sosial-ekonomi masyarakat serta kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan sosial di Kota Palu relatif tinggi dan tersebar di berbagai wilayah, dengan tingkat risiko yang lebih besar pada kawasan padat penduduk dan wilayah pesisir, seperti Balaroa, Petobo, dan Lere (Susetyo et al., 2025).

Peristiwa bencana pada 28 September 2018 yang memicu gempa bumi berkekuatan 7,4 Mw, diikuti oleh tsunami dan likuifaksi, menimbulkan dampak yang sangat luas. Bencana ini menyebabkan ribuan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta perubahan signifikan pada lingkungan dan tata ruang wilayah. Selain itu, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat mengalami gangguan yang cukup signifikan, terutama pada sektor permukiman, perdagangan, dan layanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks kesiapsiagaan, bencana ini juga memperlihatkan bahwa kapasitas respons awal masih belum optimal. Studi menunjukkan bahwa pada saat kejadian, pemahaman terhadap prosedur penanganan bencana serta koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya berjalan secara efektif, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan respon di lapangan (Sulistiawan et al., 2022). Hal ini menggambarkan bahwa kesiapan sistem penanggulangan bencana masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek koordinasi dan komunikasi antar aktor.

Pada fase pascabencana, pemerintah telah melaksanakan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti pembangunan hunian tetap (huntap), pemulihan infrastruktur, serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Program-program tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan serta mengembalikan fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya pengendalian tata ruang, yang berdampak pada efektivitas proses pemulihan (Nurfaisal et al., 2026).

Selain aspek fisik, pemulihan pascabencana juga mencakup aspek sosial. Dalam hal ini, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi tantangan yang lebih besar dalam proses pemulihan. Keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor yang mempengaruhi proses pemulihan kelompok tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan pascabencana di Kota Palu belum sepenuhnya optimal dalam mengakomodasi perspektif gender, terutama karena keterbatasan data terpilah dan pemahaman institusi terhadap isu sosial (Syari & Amrullah, 2025).

Di sisi lain, pemulihan ekonomi juga menunjukkan perkembangan yang belum optimal. Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah sektor pariwisata, yang sebelum bencana menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Beberapa tahun pascabencana, sektor ini masih mengalami penurunan kontribusi dan belum sepenuhnya pulih, yang menunjukkan bahwa proses pemulihan

ekonomi memerlukan waktu yang relatif panjang serta strategi yang lebih terintegrasi (Idham & Mukhtar, 2025).

Secara umum, kondisi pascabencana di Kota Palu menunjukkan bahwa proses pemulihan telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dari aspek kelembagaan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi antar aktor, serta mendukung pemulihan masyarakat secara menyeluruh.

Faktor Penyebab Bencana

Bencana yang terjadi di Kota Palu pada 28 September 2018 disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan dan membentuk karakter bencana berlapis (*multi-hazard*). Berdasarkan kajian dalam jurnal *Geoenvironmental Disasters* oleh Jalil et al. (2021), faktor utama yang memicu rangkaian bencana tersebut adalah gempa bumi tektonik berkekuatan 7,5 Mw. Gempa ini menjadi titik awal terjadinya bencana lanjutan, karena energi yang dilepaskan memicu perubahan kondisi geologi secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat.

Dampak langsung dari gempa tersebut adalah munculnya tsunami yang menghantam kawasan pesisir Palu. Tsunami terjadi segera setelah gempa, sehingga waktu yang tersedia untuk evakuasi sangat terbatas. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa tsunami merupakan konsekuensi dari aktivitas tektonik yang terjadi secara tiba-tiba, yang kemudian memperbesar skala kerusakan, terutama di wilayah pesisir.

Selain itu, faktor yang paling dominan dalam memperparah kerusakan daratan adalah fenomena likuifaksi. Likuifaksi terjadi ketika tanah yang jenuh air kehilangan kekuatan akibat getaran gempa dan berubah menjadi material yang menyerupai cairan. Jalil et al. (2021) menjelaskan bahwa fenomena ini menyebabkan pergerakan tanah secara masif dalam bentuk aliran lumpur (*mudflow*), yang mengakibatkan pemukiman terseret dan hancur dalam skala luas.

Kerentanan terhadap likuifaksi di Kota Palu tidak terlepas dari kondisi tanah yang didominasi oleh sedimen lepas dengan kandungan air yang tinggi. Struktur tanah seperti ini sangat mudah kehilangan stabilitas ketika mengalami guncangan kuat. Dalam analisis geoteknik yang disampaikan oleh Jalil et al. (2021), disebutkan bahwa kombinasi antara tanah longgar dan kejenuhan air menjadi faktor kunci yang memperbesar potensi terjadinya likuifaksi.

Di samping itu, tingginya intensitas getaran gempa juga berperan dalam memperluas dampak bencana. Percepatan tanah yang besar menyebabkan proses likuifaksi terjadi lebih cepat dan meluas ke berbagai wilayah. Dengan demikian, kekuatan gempa tidak hanya menjadi pemicu awal, tetapi juga memperkuat tingkat kerusakan yang terjadi di lapangan.

Secara keseluruhan, bencana di Kota Palu merupakan hasil interaksi kompleks antara gempa bumi sebagai pemicu utama, tsunami sebagai dampak lanjutan, serta likuifaksi yang diperparah oleh kondisi tanah dan intensitas getaran.

Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik geologi dan geoteknik wilayah memiliki peran penting dalam menentukan besarnya dampak bencana.

Manajemen Bencana

Manajemen pascabencana merupakan tahap strategis dalam siklus penanggulangan bencana yang berfokus pada upaya pemulihan kondisi masyarakat serta wilayah terdampak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang diperkuat oleh kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam pemulihan pascabencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial dan Psikologi

Kondisi masyarakat pascabencana di Kota Palu menunjukkan adanya tekanan psikologis yang cukup berat akibat kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, serta perpindahan hunian sementara dan tetap yang menyebabkan terganggunya stabilitas sosial dan kondisi mental masyarakat. Upaya pemulihan terus dilakukan melalui dukungan psikososial, trauma healing, serta pendampingan melalui komunitas di berbagai wilayah terdampak bencana. Menurut Koentjoro dan Andayani (2016), trauma healing pada pascabencana merupakan proses penting yang bukan hanya mengurangi tekanan psikologis saja, tetapi juga membantu individu dalam membangun kembali kemampuan adaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru. Dalam konteks Kota Palu, pendapat ini menjadi sangat relevan karena mengingat masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan permukiman dan sumber pendapatan. Namun, implementasi layanan psikososial di Kota Palu masih menghadapi keterbatasan jangkauan serta keberlanjutan program, sehingga proses pemulihan psikologi masyarakat berlangsung secara bertahap dan belum merata di seluruh wilayah terdampak bencana.

2. Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Bencana di Kota Palu telah mengakibatkan gangguan signifikan terhadap aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada sektor usaha mikro dan perdagangan kecil. Banyak pelaku usaha yang kehilangan aset dan mengalami kesulitan dalam mengakses pasar akibat kerusakan infrastruktur dan relokasi permukiman. Menurut penelitian Wahyuni dan Dartanto (2024), menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi di wilayah Palu dan Donggala sangat dipengaruhi oleh modal sosial masyarakat dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi cenderung mengalami pemulihan yang lebih cepat. Selain itu, penelitian Lelewana et al. (2024) yang dilakukan di kawasan hunian tetap seperti Duyu dan Balaroa, menunjukkan bahwa UMKM menjadi peran penting dalam pemulihan ekonomi, tetapi masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan dan keterbatasan kapasitas usaha. Pemulihan ekonomi di Kota Palu masih berlangsung secara bertahap dan memerlukan dukungan keberlanjutan (*sustainability*) dari pemerintah maupun penguatan kapasitas masyarakat.

3. Rekonstruksi Infrastruktur dan Permukiman

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembangunan kembali, seperti pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan fasilitas umum, serta

pembangunan infrastruktur dasar. Menurut penelitian Sulendra (2019), menekankan pentingnya penilaian kerusakan bangunan secara menyeluruh agar proses rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan rekonstruksi tidak hanya diukur dari jumlah bangunan yang dibangun kembali, tetapi juga dari kualitas dan ketahanan terhadap risiko bencana di masa depan. Selain itu, penelitian Elintia et al. (2024), menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan konstruksi di Sulawesi Tengah, termasuk Kota Palu, telah dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala keterlambatan pembangunan, relokasi masyarakat, dan perbedaan kebutuhan antar kelompok terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi pascabencana berkaitan dengan pendekatan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat.

4. Pemulihan Tata Kelola Pemerintahan

Bencana tsunami di Kota Palu juga berdampak pada terganggunya fungsi pelayanan publik dan koordinasi antar instansi. Proses pemulihan tata kelola dilakukan melalui normalisasi layanan publik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan transparansi pada distribusi bantuan. Menurut penelitian Bahri (2024), menunjukkan bahwa masih terdapat kendala komunikasi kebijakan, khususnya dalam implementasi relokasi masyarakat yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen pascabencana memerlukan sistem tata kelola yang adaptif, transparan, dan berbasis data agar proses pemulihan dapat berjalan efektif.

5. Penguatan Kapasitas dan Mitigasi Berkelanjutan

Aspek ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa wilayah terdampak tidak hanya pulih saja, tetapi juga menjadi lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Di kota Palu, upaya mitigasi mulai diarahkan pada pendekatan berbasis perencanaan wilayah berbasis risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan kebencanaan. Menurut penelitian Fauzi et al. (2021), menunjukkan bahwa ketahanan masyarakat di Kota Palu pascabencana sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunitas dalam beradaptasi dan membangun kembali sistem sosial. Selain itu, mitigasi berbasis ekosistem penguatan kawasan pesisir melalui vegetasi pelindung menjadi strategi penting dalam mengurangi dampak tsunami di Kota Palu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan mitigasi di Kota Palu bukan hanya bersifat struktural saja, tetapi juga non-struktural dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan mitigasi masih menghadapi tantangan dalam konsistensi perencanaan, keterbatasan SDM, dan tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata, sehingga upaya pengurangan risiko bencana masih belum sepenuhnya optimal.

Evaluasi

Evaluasi terhadap manajemen pascabencana tsunami di Palu menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan cukup signifikan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dari aspek kelembagaan,

sosial, ekonomi, maupun mitigasi berkelanjutan. Berdasarkan pendekatan *Build Back Better* dalam *Sendai Framework 2015–2030*, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem yang lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa mendatang. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi seperti pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur publik, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat. Beberapa studi menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi antar lembaga, kapasitas kelembagaan, serta implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi (Nurfaisal et al., 2026).

Dalam aspek rehabilitasi sosial dan psikologis, pemerintah bersama berbagai lembaga sosial telah melaksanakan program trauma healing, pendampingan psikososial, dan juga pemulihan komunitas bagi masyarakat terdampak. Program ini membantu masyarakat mengurangi tekanan psikologis akibat kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan mata pencaharian. Namun implementasi layanan psikososial masih belum merata di seluruh wilayah terdampak karena keterbatasan tenaga pendamping, fasilitas, serta keberlanjutan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan psikologis masyarakat masih berlangsung secara bertahap dan membutuhkan dukungan jangka panjang. Selain itu, sebagian masyarakat juga mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan relokasi baru sehingga proses pemulihan sosial tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kondisi mental dan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Di aspek ekonomi, pemerintah telah memberikan bantuan modal usaha, program pemberdayaan UMKM, dan pembangunan kembali fasilitas ekonomi masyarakat. Namun proses pemulihan ekonomi belum berjalan optimal karena banyak masyarakat kehilangan aset produktif dan mengalami kesulitan membangun kembali aktivitas ekonomi mereka. Kondisi ini diperparah dengan relokasi permukiman yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan akses terhadap pusat perdagangan dan mata pencaharian sebelumnya. Pemulihan ekonomi pascabencana menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan. Tetapi, pelaku usaha kecil dan UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya akses pasar. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi memerlukan strategi yang lebih berkelanjutan, tidak hanya berupa bantuan sementara, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang.

Di sisi rekonstruksi infrastruktur dan permukiman, pemerintah telah membangun hunian tetap, memperbaiki fasilitas umum, serta memulihkan jaringan transportasi dan pelayanan publik. Program rekonstruksi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Namun, dalam pelaksanaan rekonstruksi masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterlambatan pembangunan, proses relokasi masyarakat, dan ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Selain itu beberapa masyarakat terdampak memilih tetap tinggal di hunian sementara yang dibangun

secara mandiri karena faktor kenyamanan sosial dan kedekatan dengan lingkungan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rekonstruksi tidak hanya memerlukan pembangunan fisik, tetapi juga pendekatan sosial yang mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak. Dalam sisi asesmen kerusakan bangunan dan penguatan standar konstruksi tahan bencana juga menjadi faktor penting agar proses rekonstruksi dapat dilakukan secara aman dan berkelanjutan.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dan komunikasi kebijakan masih menjadi tantangan utama. Pada tahap awal pascabencana, distribusi bantuan dan implementasi kebijakan relokasi belum berjalan secara maksimal akibat lemahnya koordinasi, keterbatasan data, serta kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses relokasi maupun rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pascabencana memerlukan tata kelola yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis data agar proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat dan mitigasi berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah mulai mengintegrasikan pendekatan mitigasi berbasis risiko ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, serta pembangunan kawasan berbasis mitigasi. Penguatan kawasan pesisir melalui pendekatan berbasis ekosistem seperti vegetasi mangrove juga menjadi strategi penting dalam mengurangi dampak tsunami di masa depan. Namun dalam implementasi kebijakan mitigasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum konsistennya integrasi mitigasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Sehingga penguatan kapasitas masyarakat dan sistem mitigasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

SIMPULAN

Manajemen pascabencana tsunami di Kota Palu telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses rehabilitasi fisik, seperti pembangunan hunian tetap dan pemulihan infrastruktur. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta integrasi mitigasi risiko yang belum sepenuhnya optimal. Pendekatan *Build Back Better* telah mulai diterapkan dalam proses pemulihan untuk meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, tetapi pemulihan psikologis, penguatan UMKM, dan tata kelola pemerintahan masih memerlukan dukungan jangka panjang guna mengurangi kerentanan kelompok rentan (Nurfaisal et al., 2026). Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses rekonstruksi telah berkontribusi dalam mengurangi dampak awal bencana. Namun, keberlanjutan proses pemulihan sangat bergantung pada penguatan kapasitas masyarakat, transparansi kebijakan, serta integrasi *risk-based approach* dalam perencanaan pembangunan daerah guna mengurangi risiko bencana di masa

mendatang (Susetyo et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model manajemen yang adaptif berbasis data, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Kota Palu yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. A. H., Kharis, F. A., & Rahmawati, O. P. (2020). Perencanaan lanskap mitigasi tsunami berbasis ekosistem mangrove di Kota Palu. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 12(2), 101–110.
- Bahri, S. (2024). Transmisi informasi kebencanaan dalam penerapan kebijakan relokasi pascabencana di Palu. *GovSci Journal*, 5(2).
- Elintia, E., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Kusuma, K. (2024). Rehabilitation and reconstruction post-earthquake, tsunami and liquefaction disaster in Central Sulawesi Province. *International Journal of Humanities, Education and Social Sciences*, 4(1).
- Erlinna, A., Suroso, D. S. A., & Dowon, K. (2020). Implementation of *Build Back Better* (BBB) framework in achieving sustainable development goals: Case study of housing reconstruction at Duyu Urban Village, Palu City, Central Sulawesi Province. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(3).
- Fauzi, A., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2021). Community resilience in post-disaster recovery in Palu City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 708(1), 012101.
- Idham, I., & Mukhtar, D. B. (2025). Revitalization of tourism in Palu Bay after the 2018 disaster: The role of local wisdom-based collaboration. *TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination)*, 4(3), 354–361.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta.
- Jalil, A., Fathani, T. F., Satyarno, I., et al. (2021). Liquefaction in Palu: The cause of massive mudflows. *Geoenvironmental Disasters*, 8, 21. <https://doi.org/10.1186/s40677-021-00194-y>
- Koentjoro, & Andayani, B. (2016). Recovery kawasan bencana: Perwujudan trauma healing melalui kegiatan psikologi dan rohani. *Unisia*, 30(63).
- Lelewana, J., Runtuwene, R., & Sumual, J. (2024). The role of financial literacy in post-disaster financial management of MSMEs (Study in Huntap Duyu and Balaroa, Palu). *Journal of Finance and Accounting for Everyone*, 1(2).
- Nurfaisal, M. D., Syarkawi, S., & Windra, P. (2026). Pengelolaan risiko bencana pada peristiwa gempa bumi dan tsunami Palu dalam perspektif kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. *Ensiklopedia of Journal*, 8(2), 331–336.
- Rahmawati, D., Sari, R. P., & Nugroho, A. (2023). Trauma healing perawat pada korban bencana gempa bumi. *Jurnal Perawat Indonesia*, 7(1), 45–53.
- Rivana, R., Silvana, H., & Khoerunnisa, L. (2025). Tinjauan literatur sistematis: Penanggulangan bencana pada kearsipan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 14(1), 1–8.

-
- Saputri, L., Nugroho, A. R. B., & Wahyuni, P. (2025). Pemanfaatan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan terhadap kesiapsiagaan Dinas Kesehatan Kota Palu dalam penanggulangan bencana. *Indonesia Journal of Environment and Disaster*, 4(1), 29–38.
- Sulendra, I. K. (2019). Asesmen bangunan gedung pasca gempa Palu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. *Jurnal Renstra*, 2(1).
- Sulistiawan, J., Syahtaria, I., Siantur, D., Prakoso, L. Y., Saragih, H. J. R., & Bangun, E. (2022). Synergy of TNI and BNPB in management earthquake and tsunami disaster in Palu Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(1), 284–288.
- Susetyo, A., Handayani, W., & Awalia, R. (2025). Social vulnerability of multi-hazard disaster-prone areas in Palu City, Central Sulawesi. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 5(4), 3940–3950.
- Syari, S. F., & Amrullah, S. (2025). Analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan pemulihan pascabencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 249–261.
- Wahyuni, S., & Dartanto, T. (2024). Melihat Palu-Donggala dari angkasa: Modal sosial dan pemulihan ekonomi pascagempa. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 4(2).